



## PERAN PEMUKA AGAMA MEMBANGUN ETIKA EKONOMI DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Rany Claudia,<sup>1</sup> Yudi Apriansyah,<sup>2</sup> Rahma Madayanti,<sup>3</sup>  
Ronaldo Juliyansaputra<sup>4</sup>

Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu

Email: [rclaudia@unib.ac.id](mailto:rclaudia@unib.ac.id),<sup>1</sup> [yapriansyah@unib.ac.id](mailto:yapriansyah@unib.ac.id),<sup>2</sup> [rahmamadayanti35@gmail.com](mailto:rahmamadayanti35@gmail.com),<sup>3</sup>  
[ronaldojuliyansaputra3@gmail.com](mailto:ronaldojuliyansaputra3@gmail.com)<sup>4</sup>

### Abstract

*Indonesia's multicultural society consists of various religious, cultural and ethnic backgrounds, requiring economic ethics that can harmoniously accommodate diversity. Religious leaders have a strategic role in developing economic ethics based on moderate and inclusive religious moral and spiritual values. This study examines economic ethics from an interfaith perspective and the role of religious leaders in applying economic ethics to their congregations. The informants for this study were ten religious leaders from Islam, Catholicism, Protestantism, Hinduism, and Buddhism. This study used a qualitative method with a case study approach. The results of this study indicate that economic ethics from an interfaith perspective are conveyed through teaching, guidance, and example. Religious leaders play a role in instilling the principles of honesty, justice, responsibility, and solidarity in the economic activities of the community. In addition, religious leaders also play a role in facilitating interfaith dialogue to strengthen tolerance and economic cooperation across communities. This approach not only maintains social harmony but also encourages fair and sustainable economic empowerment, where religious leaders can become effective agents of social change in building economic ethics that support harmony and mutual prosperity.*

**Keywords:** *Role, Religious Leaders, Economic Ethics, Multicultural Society*

### Abstrak

Masyarakat multikultural di Indonesia terdiri dari berbagai latar belakang agama, budaya dan etnis menuntut adanya etika ekonomi yang mampu mengakomodasikan keberagaman secara harmonis. Pemuka agama memiliki peran strategis dalam membangun etika ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai moral dan spritual agama yang moderat dan inklusif. Penelitian ini mengkaji tentang etika ekonomi dalam perspektif lintas agama serta peran pemuka agama dalam penerapan etika ekonomi pada jamaahnya. Informan penelitian ini pemuka agama dari agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Buddha sebanyak sepuluh informan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini adalah etika ekonomi dalam perspektif lintas agama disampaikan melalui pengajaran, pembinaan dan teladan. Pemuka agama menanamkan prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab dan solidaritas dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, pemuka agama juga berperan dalam memfasilitasi dialog antar umat beragama untuk memperkuat toleransi dan kerja sama ekonomi lintas komunitas. Pedekatan ini tidak hanya menjaga keharmonisan sosial tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi yang adil dan berkelanjutan dimana pemuka agama mampu menjadi agen perubahan sosial yang efektif dalam membangun etika ekonomi yang mendukung kerukunan dan kesejahteraan bersama.

**Kata Kunci:** *Peran, Pemuka Agama, Etika Ekonomi, Masyarakat Multikultural*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara multikultural terdiri dari beragam suku, agama dan budaya yang hidup berdampingan (Kiswahni, 2022). Fenomena keberagaman sosial budaya merupakan karakteristik fundamental masyarakat Indonesia dan banyak negara multikultural lainnya di dunia (Sari et al., 2022). Keberagaman tidak hanya mencakup dimensi etnis dan budaya, tetapi juga agama sebagai salah satu unsur yang sangat menentukan dalam pembentukan identitas kolektif dan sistem nilai dalam masyarakat (Adiwibawa, 2024).

Indonesia sebagai negara multikultural berimplikasi pada keragaman yang tidak hanya sekedar menjadi kekayaan sosial namun juga menciptakan tantangan dalam menjaga keselarasan nilai di tengah kondisi kehidupan masyarakat yang dinamis (Nurhayati, 2021). Konteks kehidupan sosial yang kompleks serta pertemuan antar kelompok dengan latar belakang kepercayaan dan nilai yang berbeda memunculkan tantangan dalam menciptakan kesepakatan nilai, terutama dalam aspek yang menyangkut kepentingan publik, seperti etika ekonomi (Hamdani et al., 2025). Dalam konteks sosial, salah satu bidang yang krusial namun diabaikan yaitu dimensi etika pada praktik ekonomi. Ditengah arus modernisasi dan globalisasi yang menekankan efisiensi dan keuntungan, aspek moral dan etis dalam kegiatan ekonomi sering diabaikan. Fenomena seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, eksploitasi sumber daya dan gaya hidup konsumtif menjadi bagian realitas sosial ekonomi yang semakin marak terjadi (Al Fauziah, 2021). Etika ekonomi yang kuat mejadi fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

Ekonomi sebagai bagian dari sistem sosial berkaitan erat dengan konstruksi nilai kehidupan yang berlaku di masyarakat. Aktivitas ekonomi pada dasarnya menjadi aktivitas manusia yang berlandaskan pada pilihan, pertimbangan moral dan kepentingan bersama. Pada masyarakat modern yang menekankan pilihan rasional, efisiensi dan berorientasi keuntungan, aspek moral dan etika sering terpinggirkan. Hal ini menciptakan celah bagi praktik ekonomi yang eksplotatif dan tidak berkeadilan yang sering merugikan kelompok marginal. Oleh karena itu, intervensi nilai melalui institusi sosial khusus nya agama menjadi peran yang sangat signifikan dalam menyeimbangkan orientasi materialistik yang melekat pada ekonomi dengan tetap memperhatikan pertimbangan etika dan moral (Rahman, 2024).

Ekonomi sejatinya bukan sekedar aktivitas produksi, distribusi dan konsumsi barang maupun jasa, namun juga merupakan bagian dari sistem sosial yang kental dengan nilai, norma dan etika (Al Fauziah, 2021). Oleh karena itu, penanaman etika ekonomi dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan dari peran aktor sosial yang memiliki dampak besar untuk membentuk kesadaran masyarakat secara kolektif. Salah satu aktor potensial dalam konteks ini yaitu

pemuka agama. Pada masyarakat Indonesia yang religius, pemuka agama memiliki posisi penting sebagai teladan dalam rujukan terkait moral, tidak hanya dalam hal yang berkaitan dengan ibadah dan kehidupan spiritual, namun juga dalam mengarahkan nilai-nilai sosial termasuk dalam aktivitas ekonomi sehari-hari (Maksum, 2020).

Pemuka agama memiliki peran strategis sebagai aktor moral dan kultural dalam masyarakat. Pemuka agama memainkan peran signifikan dalam menyampaikan ajaran-ajaran yang didalamnya mengandung prinsip-prinsip etika ekonomi, seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, tolong menolong dan kepedulian terhadap sesama. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam membangun sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan (Anshori & Maulida, 2022). Pemuka agama dapat dimaknai sebagai individu yang dianggap cakap, memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi serta memiliki keahlian di bidang agama baik dalam ritual keagamaan hingga wawasan keagamaan yang dapat dijadikan sebagai panutan oleh masyarakat (Setiyani, 2021). Pemuka agama bukan hanya sekedar penyampai ajaran agama secara normatif namun juga sebagai sosok publik yang memiliki otoritas sosial dalam membentuk opini, mengarahkan perilaku kolektif dan menanamkan nilai-nilai etika dalam kehidupan sehari-hari. Pada praktiknya, pemuka agama dapat memberikan bimbingan melalui dakwah maupun pengajaran yang bisa mendorong umat untuk menjalankan kegiatan ekonomi secara bermoral. Peran ini menjadi relevan ditengah masyarakat yang menghadapi tantangan sosial seperti krisis moral (Syihabuddin, 2023).

Pemuka agama memiliki peranan yang signifikan dalam menginternalisasikan nilai-nilai moral dan etika yang berkontribusi terhadap tatanan sosial dan ekonomi yang lebih adil dan berkeadaban dalam kehidupan masyarakat multicultural (Mardani & Abidin, 2024). Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap sesama menjadi fondasi penting dalam membentuk perilaku masyarakat, khususnya dalam praktik ekonomi sehari-hari. Pada konteks ekonomi, pemuka agama dapat menjadi agen transformasi nilai dengan menekankan pentingnya prinsip-prinsip seperti keadilan dan kejujuran dalam transaksi, keberpihakan terhadap kelompok marginal serta tanggung jawab sosial dalam berbisnis. Nilai-nilai etika agama yang disampaikan oleh tokoh agama, seperti pentingnya sedekah, kerja keras, dan menepati janji, mampu mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif terhadap praktik ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Harefa et al., 2024) terkait “Transformasi Ekonomi dalam Perspektif PAK: Mengintegrasikan Keuangan, Etika, dan Keadilan Sosial” ditemukan bahwa dalam integrasi nilai-nilai Kristen dalam etika ekonomi masyarakat, pemuka agama Kristen dapat mendorong kesadaran keadilan sosial, pengelolaan keuangan etis dan

tanggung jawab sosial. Penelitian yang dilakukan (Djakfar, 2024) terkait “Agama, Moral dan Etika: Perspektif Dialektika dan Implikasinya dalam Ekonomi” ditemukan bahwa dalam dialektika antara agama, moral dan ekonomi dari perspektif filosofis dan teologis, agama dapat berfungsi sebagai pedoman etis yang membentuk moral ekonomi melalui nilai kejujuran, keadilan dan niat baik. Penelitian lain yang relevan dengan topik penelitian ini dilakukan (Rahman, 2024) terkait “Pemahaman Relasi Agama, Etika dan Ekonomi dalam Bingkai Kajian Kontemporer” ditemukan bahwa relasi nilai-nilai agama dan perilaku ekonomi dalam masyarakat modern memandang bahwa etika ekonomi berbasis agama penting sebagai pengatur perilaku ekonomi yang lebih adil dan spiritual. Penelitian yang dilakukan (Meidinata et al., 2024) terkait “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah untuk Memperkuat Toleransi dalam Masyarakat Multikultural” ditemukan bahwa peran prinsip-prinsip ekonomi islam seperti zakat dan larangan riba dalam membangun kohesi sosial dapat mendorong toleransi, keadilan sosial dan kepedulian antar umat lintas keyakinan.

Penelitian relevan yang telah dilakukan sebelumnya memiliki gap penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian terdahulu berfokus pada perspektif agama tertentu secara internal dan normatif, untuk penelitian yang dilakukan penulis mengisi gap penelitian tersebut karena mengkaji lintas agama serta membandingkan dan mengintegrasikan peran pemuka agama untuk membangun etika ekonomi dalam masyarakat multikultural.

Pesatnya perkembangan teknologi serta arus informasi yang begitu massif dan melemahnya otoritas tradisional, pemuka agama dihadapkan pada tantangan besar. Otoritas moral yang dahulu bersifat domini kini harus bergeser dan bersaing dengan berbagai narasi populer yang berkembang pesat di media sosial. Di sisi lain juga muncul nilai-nilai baru yang sering bertentangan dengan ajaran agama (Ilyas, 2023). Hal ini menjadi tantangan untuk pemuka agama agar tidak hanya menjadi penyampai ajaran keagamaan, namun juga harus mampu bertransformasi menjadi agen perubahan sosial yang mampu memberikan respon ditengah dinamisme kondisi masyarakat (Syihabuddin, 2023).

Masyarakat multikultural memiliki tantangan yang kompleks untuk dihadapi. Perbedaan sistem kepercayaan dan norma menjadi potensi menciptakan ketegangan nilai, khususnya dalam hal bagaimana etika ekonom seharusnya diterapkan. Namun di sisi lain, keberagaman agama juga menjadi peluang untuk membangun konsensus etika lintas iman dengan menitikberatkan pada nilai-nilai universal yang diajarkan oleh semua agama seperti integritas, keadilan dan kesejahteraan bersama. Kondisi tersebut menjadi peluang untuk pemuka agama dari berbagai latar belakang menjalin dialog antar agama dan berkolaborasi dalam menyuarkan serta menginternalisasi etika ekonomi yang inklusif dan kontekstual. Dalam

masyarakat multikultural, pemuka agama dituntut untuk membangun etika ekonomi yang bersifat universal, yang dapat diterima oleh lintas iman dan budaya. Pemuka agama juga berperan untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan nilai-nilai kemanusiaan ditengah massif nya pergeseran nilai dan individualisme.

Pada sisi lain, pemuka agama memiliki potensi untuk bersinergi secara lintas sektor untuk bisa membangun kesadaran dan kepekaan terhadap etika ekonomi yang lebih luas dan mendalam. Pemuka agama dapat berkolaborasi secara aktif dengan institusi seperti pendidikan, media massa, pemerintah serta organisasi masyarakat. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan seperti program pendidikan ekonomi berbasis nilai keagamaan di sekolah, cerama dengan memanfaatkan media digital agar dapat menyentuh lebih banyak masyarakat maupun kolaborasi dalam pemberdayaan ekonomi berbasis masjid atau gereja. Pemuka agama yang memahami ekonomi umatnya dapat menjadi penggerak dalam terciptanya komunitas ekonomi yang beretika. Pemuka agama yang memiliki posisi yang relatif dihormati oleh masyarakat pada lintas kelas sosial dan usia dapat menjadi agen perubahan yang tidak hanya dari sisi moral namun juga praktik ekonomi sehari-hari (Anshori & Maulida, 2022).

Pada konteks yang lebih jauh, peran pemuka agama dalam membangun etika ekonomi juga relevan dengan upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs) terkhusus pada bidang pengentasan kemiskinan, kesenjangan sosial dan terciptanya institusi yang inklusif dan berkeadilan. Nilai-nilai yang sarat keagamaan seperti kedilan distributif, sedekah, amanah, larangan eksploitasi dan hedonisme serta tanggung jawab menjadi pondasi dalam mendorong ekonomi yang berkeadilan (Syihabuddin, 2023).

Saat ini, peran pemuka agama dalam ranah ekonomi belum mendapatkan perhatian pada kajian ilmiah, khususnya dalam kerangka masyarakat yang kompleks dan multikultural. Hal tersebut sangat disayangkan karena pendekatan moral religius dalam ekonomi dapat memberikan kontribusi signifikan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Kajian terhadap peran pemuka agama menjadi penting bukan hanya untuk memahami bagaimana nilai-nilai agama dipraktikan dalam ruang publik, tetapi juga untuk melihat bagaimana otoritas moral dapat berkontribusi terhadap transformasi sosial dan ekonomi di tingkat komunitas. Lebih jauh, penting untuk mengkaji dinamika dan startegi yang digunakan oleh pemuka agama dalam mempengaruhi perilaku ekonomi umat di tengah perubahan sosial yang cepat, modernisasi, serta pengaruh budaya global yang semakin kuat.

Pemuka agama memainkan peran mereka dalam membangun dan menyebarkan etika ekonomi di tengah masyarakat multikultural, serta menjembatani perbedaan nilai dan membangun kesadaran kolektif yang etis, adil dan iklusif dalam bidang ekonomi. Berdasarkan

latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya untuk menggali secara mendalam bagaimana penerapan etika ekonomi dalam perspektif lintas agama di masyarakat multikultural dengan tujuan mengetahui etika ekonomi dalam perspektif lintas agama serta menjelaskan peran pemuka agama dalam penerapan etika ekonomi pada jemaahnya.

## **METODE**

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis etika ekonomi dalam perspektif lintas agama serta menjelaskan peran pemuka agama dalam penerapan etika ekonomi pada jemaahnya. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang fokus pada pemahaman yang lebih dalam terhadap suatu fenomena sosial atau perilaku manusia dengan cara menyelidiki pengalaman, pandangan dan makna yang dihasilkan oleh individu atau kelompok (Rana et al., 2023). Proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahap, dimulai dari pemilihan lokasi di Kota Bengkulu sebagai wilayah yang merepresentasikan kehidupan masyarakat multikultural. Peneliti kemudian menentukan informan secara *purposif sampling*, yaitu tokoh-tokoh agama dari berbagai latar belakang keagamaan yang dianggap memiliki pemahaman dan pengalaman langsung dalam menerapkan nilai-nilai ekonomi berbasis etika agama.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara mendalam (*deep interview*) untuk memahami secara detail bagaimana etika ekonomi dalam perspektif lintas agama serta peran pemuka agama dalam penerapan etika ekonomi pada jemaahnya. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Bengkulu sebagai salah satu wilayah yang masyarakatnya hidup dengan multikultural. Wawancara mendalam merupakan sebuah metode pengumpulan data kualitatif yang melibatkan dialog yang terstruktur dengan cara yang lebih bebas atau terbuka antara peneliti dengan informan yang telah dipilih (Sugiyono, 2013). Teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah Teori Habitus dan Modal oleh Pierre Bourdiue (Ritzer & Goodman, 2011).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Etika Ekonomi dalam Perspektif Agama**

Etika ekonomi merupakan kajian yang membahas terkait nilai moral, praktik ekonomi masyarakat yang bersinggungan dengan ajaran agama. Pada masyarakat multikultural seperti Indonesia, etika ekonomi tidak dapat dilepaskan dari peran nilai-nilai keagamaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Setiap agama yang hadir ditengah masyarakat seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha memiliki aturan norma dan prinsip spiritual yang membentuk kerangka berpikir umatnya dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Etika ini tidak hanya mengatur relasi individu dengan kekayaan, namun juga relasi sosial seperti keadilan

distributive, tanggung jawab terhadap sesama dan pengelolaan sumber daya secara etis.

Dalam perspektif agama, kelima agama memandang bahwa pengelolaan kekayaan tidak boleh lepas dari tanggung jawab sosial. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kesederhanaan, larangan eksploitasi dan kepedulian terhadap sesama menjadi irisan pertemuan etika ekonomi lintas iman. Namun, setiap agama menekankan aspek yang berbeda sesuai dengan doktrin, Sejarah dan konteks budaya masing-masing.

#### **a. Perspektif Islam: Keadilan dan Distribusi Kekayaan**

Prinsip etika ekonomi Islam berakar pada konsep keadilan, larangan riba dan kewajiban zakat sebagai bentuk aturan distribusi kekayaan. Al-Qur'an dan Hadis secara tegas mengatur transaksi ekonomi yang halal, jujur serta menghindari penindasan ekonomi terhadap pihak lemah. Islam juga memandang kerja dan perdagangan sebagai bagian dari ibadah, yang berarti setiap aktivitas ekonomi harus diniatkan untuk kebaikan dan dilakukan secara etis. Seperti yang disampaikan oleh informan R:

*“Telah di jelaskan bahwasannya halal nubaya haramuriba dalam berdagang itu memang sudah ada, khususnya dalam Al-Qur'an terus dalam menggandakan timbangan itu tidak boleh dan hal itu yang dinamakan riba yang halal baya halal jualan muharam wariba atau haram riba itu memang di pandangan khusus dan selanjutnya banyak itu tentang ayat-ayat jual beli tapi tidak jauh yang namanya menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*

Etika ekonomi dalam Islam juga mengajarkan pada distribusi kekayaan melalui konsep sedekah atau sumbangan. Konsep sedekah diinternalisasikan sebagai bentuk rasa syukur dan bentuk empati sosial untuk saling membantu dan meringankan beban dalam hubungan bermasyarakat. Seperti yang disampaikan oleh informan I :

*“Dalam Al-Qur'an orang-orang yang menakutkan hartanya dengan Allah jadi akan dilipat gandakan, misalnya dari segi sosialnya bantu orang yang kesusahan, di samping itu bisa menimbulkan hati yang tenang orang yang bisa memberi kan rezeki orang lain jadi bisa mengurangi rasa gelisah. Insyallah rezekinya akan di tambah oleh Allah, kalau kita bersyukur kata Allah akan di tambah rezekinya oleh Allah”*

#### **b. Perspektif Katolik: Solidaritas dan Subsidiaritas**

Gereja Katolik menempatkan etika ekonomi dalam kerangka ajaran sosial gereja yang menekankan prinsip solidaritas, martabat manusia dan subsidiaritas. Ensiklik Rerum Novarum menekankan pentingnya perlindungan terhadap kaum yang termarginalkan serta keharusakan menyeimbangkan hak pemilik modal dan tenaga kerja. Seperti yang disampaikan oleh informan RP :

*“Etika ekonomi dalam ajaran Katolik berakar pada prinsip cinta kasih, keadilan, dan martabat manusia. Ekonomi tidak dipandang sebagai tujuan, tetapi sebagai sarana untuk membangun kehidupan bersama yang adil dan bermartabat. Merujuk pada*

*dokumen sosial Gereja seperti Rerum Novarum, yang menyerukan perlindungan terhadap hak-hak pekerja, pemberian upah yang layak, serta penciptaan lapangan kerja yang manusiawi. Selain itu dalam praktik gereja, aktivitas ekonomi seperti penjualan barang-barang rohani bukan ditujukan untuk meraup untung, melainkan untuk mendukung pelayanan umat”.*

Etika ekonomi dalam perspektif Katolik juga menekankan pada subsidiaritas, dimana menegaskan bahwa segala urusan atau kebijakan diselesaikan oleh otoritas atau komunitas yang paling kecil, paling dekat dan paling mampu secara langsung. Prinsip subsidiaritas bertujuan untuk menghormati kebebasan, tanggung jawab dan partisipasi setiap individu atau kelompok dalam masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh informan FG :

*“Bahwa gereja mengelola pinjaman dan bantuan keuangan dalam bentuk koperasi yang berbasis kasih, bukan semata laba. Aktivitas ekonomi dalam gereja diarahkan untuk memperkuat komunitas, bukan untuk memperkaya diri sendiri”.*

### **c. Perspektif Protestan: Etos Kerja dan Pengelolaan Bertanggung Jawab**

Tradisi Protestan dalam aliran Calvinisme menekankan konsep etos kerja, tanggung jawab individual dan Stewardship atau yang disebutkan dengan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Etika ekonomi Protestan mendorong disiplin, efisiensi dan integritas dalam aktivitas ekonomi. Seperti yang disampaikan oleh informan EM:

*“Jika kita cermati, justru kitab suci banyak memberikan petunjuk, meski tidak secara langsung membahas trik-trik atau langkah praktis untuk meraih kekayaan. Prinsip paling mendasar yang diajarkan adalah bahwa siapa pun yang ingin menjadi kaya harus mau bekerja keras, bersungguh-sungguh, dan tidak hanya bermimpi di tempat. Kitab suci mengajarkan bahwa hidup itu membutuhkan usaha dan tanggung jawab, bukan sekadar menunggu keberuntungan atau mengharapkan hasil tanpa kerja. Jadi, bagaimana caranya agar bisa mendapatkan keuntungan atau menjadi sukses? Jawabannya adalah dengan bekerja keras, berusaha maksimal, dan tidak mudah menyerah. Seseorang yang hanya berangan-angan atau bermimpi ingin kaya tanpa melakukan upaya apa pun, tentu tidak akan pernah mencapai tujuannya. Keinginan tanpa usaha sama sekali tidak akan menghasilkan apa-apa”.*

Prinsip Stewardship dalam agama Protestan merupakan etika ekonomi yang mengajarkan bahwa manusia sebagai pengelola yang diberikan Tuhan. Segala sesuatu yang dimiliki seperti waktu, bakat, harta benda, lingkungan, bahkan hidup merupakan titipan Tuhan yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab serta digunakan untuk kebaikan bersama. Seperti yang disampaikan oleh informan VK :

*“Kita adalah orang-orang yang sudah menerima berkat Tuhan. Dan sepatutnya kita menjadi berkat. Ketika Tuhan itu yang Maha Kuasa itu memberkati kita, berarti berkat itu sudah milik kita. Artinya Tuhan berkehendak kita juga bisa menjadi berkat bagi siapa. Nah ketika kita melakukan apa yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan itu yang memberkati, maka itulah yang harus kita laksanakan. Itu ungkapan syukur kita. Makanya setiap orang berbuat baik itu dia bersyukur, dalam iman Kristen ya, itu*

*adalah ungkapan syukurnya, bukan mencari pahala. Aku melakukan yang baik kepada kalian bukan mau saya masuk ke sorga, tapi sorga itu ya sudah diberikan”.*

#### **d. Perspektif Hindu: Dharma dan Kesimbangan Artha**

Perspektif dalam agama Hindu, etika ekonomi dilaksanakan dalam tiga landasan utama yaitu pertama **Dharma** atau tugas moral, kedua **Artha** atau kekayaan yang sah dan ketiga **Karma** atau akibat moral dari tindakan ekonomi. Dharma menjadi dasar moral yang mengarah kepada tindakan atau karma. Sedangkan artha adalah tujuan dari materi yang harus diwujudkan dengan cara yang benar sesuai dengan dharma . Pengumpulan harta dalam proses spiritual harus dijalankan tanpa melanggar nilai moral dan keseimbangan hidup. Seperti yang disampaikan oleh informan PKN:

*“Dalam agama Hindu ada kitab yang menjadi pedoman yaitu Kitab Manawa Dharmasastra, dimana setiap tindakan menghasilkan akibat. Karma baik membawa pahala dan kelahiran yang lebih baik, karma buruk menghasilkan penderitaan dan kelahiran yang lebih rendah. Selain itu, bagi Hindu kekayaan hal yang wajib di miliki, melaksanakan agama tanpa memiliki harta itu mustahil”*

Keseimbangan Artha dalam Hindu merupakan konsep pengelolaan kekayaan, materi dan kesejahteraan hidup secara bijaksana, proporsional dan selalu berlandaskan pada nilai-nilai moral. Pemuka agama Hindu memiliki peran dalam menjaga nilai **Ahimsa**, yaitu masyarakat tanpa kekerasan atau eksploitasi serta mengarahkan paraktik ekonomi masyarakat agar selaras dengan tradisi dan alam. Seperti yang disampaikan oleh informan PA:

*“Penggunaan harta di atur dari penghasilan. Terdapat dua jenis penghasilan, pertama penghasilan untuk makan, kedua penghasilan untuk kegiatan agama. Dalam agama Hindu tidak mungkin berlebihan bila di atur serta menggunakan kekayaan untuk kebaikan bersama”.*

#### **e. Perspektif Buddha: Jalan Tengah dan Usaha Benar**

Etika ekonomi dalam perspektif Buddha dilandaskan pada konsep **Jalan Tengah** (*Majjhima Patipada*) dan **Usaha Benar** (*Samma Ajiva*). Aktivitas ekonomi harus menjauhkan dari keserakahan dan dijalankan dengan niat baik serta tidak merugikan hidup lain. Prinsip jalan tengah dalam perspektif Buddha menolak ekstremitas baik dalam kemiskinan maupun kemewahan dan menekankan keseimbangan antara kebutuhan materi dan spiritual. Agama Buddha juga menginternalisasikan terkait nilai-nilai kesederhanaan, hidup bersahaja dan tidak berlebihan dalam konsumsi atau akumulasi kekayaan. Tujuan utama dalam kegiatan ekonomi bukan hanya mengejar kekayaan melainkan mencapai kesejahteraan bersama dan mengurangi penderitaan serta memperhatikan keharmonisan dengan lingkungan dan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh informan RPST:

*“Agama Buddha sangat menekankan kesederhanaan dan kepuasan (appaniccha). Konsumsi berlebihan dipandang sebagai akar dari keserakahan dan penderitaan, yang dapat mengarah pada ketidakpuasan dan penderitaan. Buddha mengajarkan pentingnya keseimbangan dan penggunaan sumber daya secara bijaksana. Buddhisme mengakui adanya perbedaan dalam kekayaan dan status, namun menekankan bahwa kekayaan harus digunakan untuk kesejahteraan bersama dan membantu mereka yang kurang beruntung. Praktik-praktik seperti dana (kedermawanan) sangat dianjurkan untuk mengurangi ketimpangan dan menumbuhkan kasih sayang. Eksploitasi sumber daya alam bertentangan dengan prinsip metta (cinta kasih universal) dan karuna (welas asih) terhadap semua makhluk. Agama Buddha mendorong kehidupan yang harmonis dengan alam dan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, bukan eksploitasi demi keuntungan semata”.*

Usaha Benar (*Samma Ajiva*) dalam perspektif Buddha merupakan salah satu unsur dari Jalan Mulia Berunsur Delapan yang menjadi pedoman etika dan moral dalam kehidupan Buddhis termasuk dalam aktivitas ekonomi. Usaha Benar mengajarkan kepada Buddhis agar mencegah dan meninggalkan perbuatan tidak baik dalam mencari nafkah serta menghindari pekerjaan yang merugikan, menipu atau mengeksploitasi makhluk lain. Selain itu, juga senantiasa membina dan mengembangkan perbuatan baik seperti kejujuran, tanggung jawab dan kemurahan hati. Seperti yang disampaikan oleh informan S:

*“Dalam Buddhisme, perdagangan dan kewirausahaan tidak dilarang. Sebaliknya, mata pencarian yang benar (samma ajiva) adalah bagian dari Jalan Mulia Berunsur Delapan. Ini berarti seseorang harus mencari nafkah dengan cara yang tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Ini mencakup perdagangan yang jujur dan adil, tanpa penipuan, pemerasan, atau eksploitasi. Kewirausahaan yang etis, yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak melibatkan praktik yang merugikan, sangat dianjurkan”.*

## **2. Peran Pemuka Agama dalam Etika Ekonomi**

Penelitian ini menemukan data bahwa pemuka agama dari berbagai latar belakang memiliki kontribusi riil dalam menginternalisasikan serta mengarahkan praktik ekonomi umat ke arah yang lebih etis, adil dan berorientasi sosial. Peran mereka tidak hanya terbatas pada ranah spiritual namun juga menyentuh aspek perberdayaan ekonomi, Pendidikan finansial dan advokasi keadilan sosial. Berikut temuan spesifik berdasarkan masing-masing agama:

### **a. Peran Pemuka Agama Islam**

Pemuka agama Islam seperti ulama, kiai dan ustazd memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran etika ekonomi umat melalui pengajaran nilai-nilai syariah seperti keadilan (‘adl), larangan riba dan kewajiban zakat. Selain itu ulama juga aktif mensosialisasikan prinsip ekonomi syariah dalam forum pengajian, khutbah Jumat dan kajian fiqh muamalah. Pemuka agama Islam juga berperan sebagai mediator ekonomi sosial, seperti

dalam distribusi zakat dan pengelolaan Baitul maal yang mendukung masyarakat pra sejahtera bahkan baitul maal berfungsi juga sebagai lembaga keuangan publik yang mengelola keuangan negara untuk kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya berfokus pada aspek material saja akan tetapi juga pada aspek spiritual. Temuan ini menjadi penegas pemuka agama Islam yang berperan sebagai pendidik moral ekonomi dan penggerak struktur distribusi keuangan berbasis nilai-nilai Islam. Seperti yang disampaikan oleh informan R :

*“Setiap pengajian itu sesuai dengan judulnya, misalnya judulnya ekonomi islam dan disitu kita menerangkan bagaimana ekonomi Islam, bagaimana kita harus sedekah, saling tolong menolong dan saling memberi. Contohnya dengan zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dan zakat mal itu sangat penting dan itu termasuk ekonomi masyarakat. Orang yang kaya itu bisa bersedekah dengan zakat mal, misalnya uang 30 juta ini diberikan atau dialihkan, lalu kemudian dibuat modal oleh orang yang membutuhkan modal dan zakat mal itu bagus. Sedangkan zakat fitrah khusus untuk makan, seperti fakir miskin dan anak yatim, sedangkan zakat mal ini bisa untuk modal dan bisa di berikan ke siapa saja yang membutuhkan”.*

#### **b. Peran Pemuka Agama Katolik**

Pemuka agama Katolik seperti pastor dan biarawan/biarawati menjalankan peran sebagai internalisasi etika ekonomi melalui dorongan pembentukan dan pengelolaan Credit Union (CU) sebagai bentuk ekonomi berbasis komunitas yang mengedepankan tanggung jawab dan transparansi. Selain itu biara juga mengelola unit usaha mikri dan pelatihan keterampilan ekonomi untuk kelompok rentan seperti perempuan, buruh dan petani. Praktik ini merupakan bentuk implementasi dari etika ekonomi Katolik yang menekankan prinsip solidaritas dan keadilan sosial. Seperti yang disampaikan oleh informan RPJPS dan FG:

*“Dalam peran mereka sebagai pemuka agama, RPJPS aktif menyampaikan nilai-nilai etika ekonomi dalam homili, devosi, dan pembinaan umat. Ia pernah menasihati pelaku usaha agar menjauhi praktik bisnis yang tidak jujur, dan mengajak umat kembali pada prinsip kasih. Informan FG turut menyampaikan renungan dan mendampingi umat dalam perenungan moral, termasuk dalam hal ekonomi. Ia sering menyoroti pentingnya transparansi dalam laporan keuangan kegiatan gereja dan memberikan teladan dalam hidup sederhana”.*

#### **c. Peran Pemuka Agama Protestan**

Pemuka agama protestan seperti pendeta menanamkan etika ekonomi seperti etos kerja, tanggung jawab dan akuntabilitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah. Bentuk praktik dari nilai-nilai tersebut dapat dilihat dari pendeta yang aktif membimbing jemaat dalam pengelolaan keuangan keluarga, wirausahaan berbasis komunitas dan penolakan terhadap gaya hidup konsumerisme. Gereja tertentu juga memiliki unit pelatihan wirausaha yang dilandasi pada prinsip stewardship atau dikenal dengan tanggung jawab pengelolaan harta yang dipercayakan

oleh Tuhan. Selain itu, pemuka agama Protestan juga menginisiasi gerakan ekonomi mandiri gereja, termasuk usaha pertanian kolektif dan pengelolaan aset gereja untuk kepentingan publik. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh informan Em:

*“Saya mengajarkan bagaimana kebenaran, bagaimana keadilan dalam semua, itu atas dasar kasih. Kasih yang dari Tuhan itu sendiri, yang kalau kita sebut adalah kasih agave atau kasih yang tulus, kasih yang dari Tuhan, itu yang kita sampaikan. Kasih itu untuk semua. Nah, jadi ketika kita bicara apapun dalam iman kekristianan itu, ya pasti bicara tentang keadilan dalam semua sektor. Baik itu ekonomi, sosial, budaya, politik. Bahkan, ketika kita bicara keadilan, ya, semua hal dalam topik kekristianan mengucapkan dan menyampaikan itu. Contohnya adalah ketika disampaikan kasihilah segala hal dengan sebenar hatimu, dengan sebenar kekuatanku, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi, ketika itu disampaikan, berarti dalam sektor ekonomi sendiri itu, kita tahu apa yang baik bagi kita. Seperti yang baik bagi kita itu juga kita harus sampaikan kepada orang lain. Baik kita sebagai pembeli, baik kita sebagai penjual. Dan dalam sektor ekonomi, karena transaksional ekonomi itu berlaku adil bagi semua orang.”*

#### **d. Peran Pemuka Agama Hindu**

Pemuka agama Hindu memberikan arahan ekonomi berdasarkan prinsip Dharma (tugas moral), Artha (kekayaan sah) dan Karma (konsekuensi tindakan). Pemuka agama Hindu terlibat dalam pengaturan sistem ekonomi lokal seperti pasar adat yang berlandaskan panai nilai kebersamaan dan keberlanjutan. Selain itu, penting untuk tidak mengumpulkan kekayaan secara berlebihan dan mendorong umat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang tidak melukai alam (ahimsa) serta menyeimbangkan antara pencapaian ekonomi dan tanggung jawab sosial.

#### **e. Peran Pemuka Agama Buddha**

Pemuka agama Buddha melaksanakan peran dalam internalisasi nilai-nilai etika ekonomi umat melalui ajaran tentang usaha benar (samma ajiva), dana (kedermawan) dan gaya hidup sederhana. Hasil penelitian menemukan data dilapangan terkait pemberian bimbingan pilihan pekerjaan etis, misalnya menolak praktik ekonomi yang berbasis pada perusakan lingkungan, perjudian atau penipuan. Umat didorong untuk menghindari kemelekatan terhadap harta dan menjalani konsumsi sadar. Wihara juga memiliki program dana sosial dan pelatihan wirausaha yang mendorong kemandirian ekonomi berbasis nilai welas asih. Pemuka agama Buddha menekankan pada kesadaran batin dan moralitas individu dalam pengambilan keputusan ekonomi sehari-hari. Seperti yang disampaikan oleh RPST:

*“Akan mengajarkan nilai-nilai etika ekonomi kepada umat melalui berbagai cara yaitu, (1) Khutbah dan ceramah Dhamma, mengintegrasikan ajaran tentang mata pencarian yang benar, konsumsi bijaksana dan dana dalam khutbah rutin. (2) Studi Sutta (kitab suci) yaitu, membahas sutta-sutta yang relevan yang menyinggung tentang ekonomi, seperti Sigalovada Sutta (tentang hubungan yang benar dalam masyarakat)*

atau *Dighajanu Sutta* (tentang faktor-faktor keberhasilan duniawi). (3) *Diskusi kelompok yaitu, mengadakan sesi diskusi di mana umat dapat berbagi pengalaman dan mencari solusi Buddhis untuk dilema etika ekonomi yang mereka hadapi.* (4) *Pemberian contoh yaitu, mengajak umat untuk berpartisipasi dalam kegiatan dana dan layanan sosial.* (5) *Konseling personal yaitu, memberikan nasihat individu kepada mereka yang mencari bimbingan tentang bagaimana menerapkan etika Buddhis dalam kehidupan ekonomi mereka”.*

### **3. Implikasi Teori**

Teori Habitus dan Modal oleh Pierre Bourdieu menjelaskan terkait habitus individu terbentuk melalui pengalaman sosial, keluarga, pendidikan dan institusi termasuk di dalamnya agama. Habitus mennciptakan kecenderungan berpikir dan bertindak yang tertanam dalam tubuh dan pikiran serta berulang dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan modal sosial adalah jaringan hubungan sosial yang menghasilkan keuntungan maupun potensi bagi individu atau kelompok. Modal simbolik merujuk pada pengakuan, kepercayaan dan legitimasi sosial yang membuat ucapan atau tindakan yang dilakukan seorang individu dianggap sah dan berpengaruh (Haraker et al., 2009).

Berdasarkan hasil temuan penelitian menunjukkan peran pemuka agama dalam membentuk dan menguatkan etika ekonomi dalam komunitas keagamaan. Temuan penelitian menunjukkan etika ekonomi lintas agama bukan hanya sekedar norma formal namun juga menjadi bagian habitus yang terbentuk karenakan pengalaman keagamaan yang terjadi berulang kali dan tertanam sejak dini dalam diri individu. Seperti dalam komunitas muslim terkait praktik zakat, larangan riba, keharusan berdagang dengan jujur menjadi bagian dari kesepakatan etika ekonomi umat. Hal serupa juga diperoleh di komunitas Katolik melalui bentuk habitus solidaritas dan koperasi. Sedangkan dalam komunitas Protestan dalam bentuk etos kerja, Hindu dan Buddha melalui habitus keseimbangan, kesederhanaan dan tanggung jawab terhadap alam. Sehingga, etika ekonomi merupakan bentuk praktik sosial yang dibangun dan diwariskan melalui ruang-ruang simbolik agama seperti pengajian, misa, wihara, pura maupun kegiatan keagamaan lainnya. Habitus ini kemudian menjadi nilai-nilai etika ekonomi yang mengakar dalam pola pikir serta tindakan umat pada konteks ekonomi sehari-hari.

Temuan penelitian juga menganalisis pemuka agama memiliki posisi strategis sebagai orang yang memiliki modal simbolik dan modal sosial. Melalui modal ini pemuka agama mampu menginisiasi program ekonomi komunitas seperti koperasi, UMKM, pelatihan usaha serta dana sosial. Selain itu, pemuka agama juga menjadi perantara kepercayaan antara umat dengan institusi berbasis nilai keagamaan. Sehingga peran pemuka agama tidak hanya bersifat

simbolik namun juga produktif secara sosial dan ekonomi karena mampu untuk mengarahkan serta memobilisasi sumber daya komunitas.

Pada konteks masyarakat multikultural, pemuka agama juga berperan dan mereproduksi habitus ekonomi yang sesuai dengan ajaran masing-masing sekaligus berkontribusi terhadap penciptaan ruang dialog dan nilai bersama. Meskipun berbeda dalam ajaran doctrinal namun kelima agama besar yang diteliti sama-sama menekankan nilai keadilan, tanggung jawab dan solidaritas. Teori Bourdieu menganalisis dalam medan sosial yang plural pemuka agama beroperasi dalam arena simbolik yang berbeda namun dapat saling bersilang untuk membentuk etika ekonomi yang bisa digunakan secara kolektif.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Etika ekonomi dalam perspektif lintas agama mengandung nilai-nilai universal seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap sesama. Etika ekonomi Islam terwujud melalui prinsip syariah seperti zakat, larangan riba dan distribusi kekayaan yang merata. Katolik menekankan etika ekonomi pada solidaritas sosial, keadilan struktural dan perlindungan terhadap kelompok lemah. Etika ekonomi Protestan tercermin melalui etos kerja, tanggung jawab serta pengelolaan kekayaan yang berlandaskan iman. Hindu menginternalisasikan etika ekonomi mereka dalam kerangka Dharma (kewajiban moral), Artha (kekayaan sah) dan karma (konsekuensi tindakan). Etika ekonomi Buddha berlandaskan pada prinsip usaha benar (*samma ajiva*), kemurahan hati dan hidup sederhana.

Pemuka agama memainkan peran penting dalam penerapan etika ekonomi pada jemaahnya dalam bentuk pendidikan moral, teladan sosial maupun penggerak kegiatan ekonomi berbasis nilai keagamaan. Pemuka agama memanfaatkan modal simbolik dan sosial untuk mempengaruhi ekonomi umat. Pemuka agama menjadi agen dalam menginternalisasikan nilai-nilai yang berkaitan dengan etika ekonomi melalui ceramah, khutbah, kegiatan keagamaan hingga pendampingan ekonomi komunitas. Pada masyarakat multikultural pemuka agama berpotensi menciptakan ruang kolaborasi lintas agama yang memperkuat ikatan nilai toleransi dan kebersamaan serta memperkaya praktik ekonomi yang berkeadilan bagi semua. Pendekatan teori habitus dan modal oleh Pierre Bourdieu menemukan bahwa nilai-nilai etika ekonomi dibentuk dan diproduksi melalui struktur sosial keagamaan dan pemuka agama memegang peran sentral dalam mengarahkan dan mempertahankan pada praktik kehidupan umat beragama.

### **Saran**

Penelitian berikutnya menggunakan penelitian kuantitatif agar mendapatkan gambaran

yang lebih luas dengan cakupan yang lebih luas. Kemudian, penelitian selanjutnya dapat mengkaji dari segi peran pemuka agama dari perspektif jamaah/ penganut agama sebagai objek dari peran pemuka agama yang dirasakan pengikutnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adiwibawa, D. N. (2024). Peran Religi dan Tradisi Spiritual dalam Pembentukan Identitas Psikologis Masyarakat Sasak di Lombok. *Nusantara Hasana Journal*, 3(10), 91–96.
- Al Fauziah, S. N. I. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Vol. 5, Issue 01). <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1846/>
- Anshori, A. G., & Maulida, E. (2022). Peran Pemuka Agama dalam Meningkatkan Kesadaran Ekonomi Syariah di Komunitas Muslim. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 101–115.
- Djakfar, M. (2024). Agama, Moral dan Etika: Perspektif Dialektika dan Implikasinya dalam Ekonomi. *El Harkah: Jurnal Budaya Islam*.
- Hamdani, H., Hebby, R., Alwadipa, B. P., Harahap, M. F., Saputra, E., & Farid, D. (2025). Implementasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Masyarakat Multikultural di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 5(1), 131–139. <https://doi.org/10.55606/jaemb.v5i1.5789>
- Haraker, R., Mahar, C., & Wilkes, C. (2009). *Habitus x Modal + Ranah = Praktik: Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdie*. Jalasutra.
- Harefa, K., Boiliu, E. R. B., & Zebua, R. (2024). *Transformasi ekonomi dalam perspektif PAK: Mengintegrasikan keuangan, etika, dan keadilan sosial*. 9(September), 202–214.
- Ilyas, I. S. A. (2023). Agama Dan Relasi Budaya Dalam Islam: Menjelajahi Peran Penting Budaya Dalam Pembentukan Identitas Keagamaan. *Al-Aufa: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, 5(2), 113–133. <https://doi.org/10.32665/alaufa.v5i2.1667>
- Kiswahni, A. (2022). Peran Masyarakat Majemuk dalam Melestarikan Keanekaragaman Budaya di Indonesia. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(6), 235–243. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i6.1670>
- Maksum, A. (2020). Internalisasi Nilai-Nilai Etika Ekonomi Islam Melalui Dakwah Kultural. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 14(1), 45–49.
- Mardani, D. A., & Abidin, M. Z. (2024). Agama dan Etika Ekonomi Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 7(2), 1030–1043. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.1047.Religion>
- Meidinata, E., Miftahurrohmah, S., Mawadati, Z., Rochim, A. F., Chusna, R., Rifaza, R., Kusuma, N. A., Fatimah, S., Roudhoh, S., Agustin, A. D., Utami, N. F., Alfarizki, M. W.,

- Febrianto, M. A., & Kediri, I. (2024). Penguatan Karakter Remaja melalui Nilai-Nilai Keagamaan sebagai Upaya Pencegahan Kenakalan Remaja. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 578–582. <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/welfare.v2i3.1596>
- Nurhayati, A. (2021). Multikulturalisme dan Etika Ekonomi dalam Perspektif Sosiologi Agama. *Jurnal Sosiologi Agama*, 8(2), 123–136.
- Rahman, A. (2024). Pemahaman Relasi Agama, Etika, dan Ekonomi dalam Bingkai Kajian Kontemporer. *Jurnal Lentera*, 3(1), 1–15. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827%0Ainternal-pdf//semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.10>
- Rana, K., Poudel, P., & Chimoriya, R. (2023). Qualitative Methodology in Translational Health Research: Current Practices and Future Directions. *Healthcare*, 11(19), 2665. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/healthcare11192665>
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2011). *Teori Sosiologi Modern (Edisi ke-7)*. Kencana.
- Sari, F. L., Intang, & Najicha, F. U. (2022). Nilai-Nilai Sila Persatuan Indonesia Dalam Keberagaman Kebudayaan Indonesia. *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(1), 79–85. <https://doi.org/10.33061/jgz.v11i1.7469>
- Setiyani, W. (2021). Studi Ritual keagamaan. In *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau* (Vol. 16, Issue 2). Pustaka Idea.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. In *Ajaran Metodologi Penelitian* (p. 456). Alfabeta.
- Syihabuddin, M. (2023). Dialog Lintas Agama dan Etika Ekonomi: Meneguhkan Peran Agama dalam Masyarakat Plural. *Jurnal Etika Sosial*, 11(1), 67–79.